



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SINTANG**

NOMOR: 465 / 40 / DINSOS / VII / 2020

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SINTANG,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang telah ditetapkan Keputusan Bupati Sintang Nomor: 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utamadan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik selain Informasi yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Sosial Kabupaten Sintang dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Daftar Informasi Publik (DIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KETIGA : Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, adalah merupakan informasi publik yang harus selalu ada pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang;
- KEEMPAT : Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, adalah merupakan Informasi tentang kejadian luar biasa yang terjadi di Wilayah Kabupaten Sintang;
- KELIMA : Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sintang
pada tanggal : 7 Juli 2020

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SINTANG
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU**



Dra. SETINA, M.Si

Tembusan:

- Yth
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 3. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang di Sintang
 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 465/ 40 /DINSOS/III/2020
 TANGGAL : 7 JULI 2020
 TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

NO	NAMA INFORMASI	PEJABAT YG MENGUJASAI/PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI
A	INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA			
1.	Alamat kantor lengkap badan publik	Sekretaris	Kasubag Aparatur dan Umum	2017
2.	Visi dan Misi badan publik	Sekretaris	Kasubag Aparatur dan Umum	2017
3.	Tugas dan fungsi badan publik	Sekretaris	Kasubag Aparatur dan Umum	2016
4.	Struktur organisasi badan publik	Sekretaris	Kasubag Aparatur dan Umum	2017
5.	Profil pimpinan badan publik	Sekretaris	Kasubag Aparatur dan Umum	
6.	LHKPN pimpinan badan publik yang telah diverifikasi oleh KPK	Sekretaris	Kasubag Keuangan, Program & Pertenggkapan	2019
7.	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2020	Sekretaris	Kasubag Keuangan, Program & Pertenggkapan	2019
8.	Kalender kegiatan tahun 2020	Sekretaris	Kasubag Keuangan, Program & Pertenggkapan	2018
9.	Laporan Kinerja badan publik tahun 2019	Sekretaris	Kasubag Keuangan, Program & Pertenggkapan	2018
10.	Laporan keuangan tahun 2019	Sekretaris	Kasubag Keuangan, Program & Pertenggkapan	2018
11.	Peraturan, keputusan/kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan badan publik	Sekretaris	Kasubag Aparatur dan Umum	
12.	Informasi tentang cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik	Kabid Pemberdayaan Sosial & FM	Kasi Pemberdayaan Keluarga dan KS	
13.	Ringkasan laporan pelayanan informasi yang memuat:			
	a. Jumlah pemohon informasi publik yang diterima	Kabid Pemberdayaan Sosial & FM	Kasi Pemberdayaan Keluarga dan KS	
	b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik	Kabid Pemberdayaan Sosial & FM	Kasi Pemberdayaan Keluarga dan KS	
	c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya	Kabid Pemberdayaan Sosial & FM	Kasi Pemberdayaan Keluarga dan KS	
	d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Kabid Pemberdayaan Sosial & FM	Kasi Pemberdayaan Keluarga dan KS	
B	PPID PEMBANTU			
14.	SK penetapan PPID	Sekretaris	Kasubag Aparatur dan Umum	2020
15.	Struktur organisasi PPID Pembantu	Sekretaris	Kasubag Aparatur dan Umum	2020
16.	Daftar informasi publik yang telah dimutakhirkan tahun 2020	Kabid Pemberdayaan Sosial & FM	Kasi Penanggulangan Kemiskinan	

7.	Laporan layanan informasi tahun 2019	Kabid Pemberdayaan Sosial & FM	Kasi Penanggulangan Kemiskinan	
18.	Laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik	Kabid Pemberdayaan Sosial & FM	Kasi Penanggulangan Kemiskinan	
19.	Koordinasi/rapat secara rutin	Sekretaris	Kasubag Aparatur dan Umum	
20.	Penyediaan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik	Sekretaris	Kasubag Keuangan,Program & Perlengkapan	
21.	Formulir permohonan informasi publik	Kabid Pemberdayaan Sosial & FM	Kasi Kepahlawanan & KS	2020
22.	Formulir permohonan keberatan	Kabid Pemberdayaan Sosial & FM	Kasi Kepahlawanan & KS	2020
23.	Formulir dan tanda terima permohonan informasi	Kabid Pemberdayaan Sosial & FM	Kasi Kepahlawanan & KS	2020
24.	Formulir dan tanda terima keberatan	Kabid Pemberdayaan Sosial & FM	Kasi Kepahlawanan & KS	2020
25.	Daftar registrasi permohonan	Kabid Pemberdayaan Sosial & FM	Kasi Kepahlawanan & KS	
26.	Jadwal pelayanan informasi publik	Kabid Pemberdayaan Sosial & FM	Kasi Kepahlawanan & KS	
27.	Informasi publik melalui website ataupun media sosial	Kabid Pemberdayaan Sosial & FM	Kasi Kepahlawanan & KS	
C	PERATURAN/KEBIJAKAN/KEPUTUSAN			
28.	Peraturan/kebijakan/keputusan terkait pelayanan informasi publik pada badan publik	Sekretaris	Kasubag Aparatur dan Umum	2020
29.	Informasi yang dikecualikan yang ditetapkan	Sekretaris	Kasubag Aparatur dan Umum	
30.	Kebijakan mengenai standar biaya perolehan informasi	Sekretaris	Kasubag Aparatur dan Umum	
D.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK			
31.	SOP Pengelolaan permohonan informasi	Kabid Rehabsos,Perlinjamsos	Kasi Jaminan Sosial	2020
32.	SOP Pengelolaan keberatan atas informasi	Kabid Rehabsos,Perlinjamsos	Kasi Jaminan Sosial	2020
33.	SOP Penanganan sengketa informasi publik	Kabid Rehabsos,Perlinjamsos	Kasi Rehabilitasi Sosial	2020
34.	SOP penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik	Kabid Rehabsos,Perlinjamsos	Kasi Rehabilitasi Sosial	2020
35.	SOP pengujian tentang konsekwensi	Kabid Rehabsos,Perlinjamsos	Kasi Rehabilitasi Sosial	2020
36.	SOP pendokumentasian informasi publik	Kabid Rehabsos,Perlinjamsos	Kasi Perlindungan Sosial	2020
37.	SOP pendokumentasian informasi yang dikecualikan	Kabid Rehabsos,Perlinjamsos	Kasi Perlindungan Sosial	2020
38.	SOP pedoman pengelolaan organisasi	Sekretaris	Kasubag Aparatur dan Umum	
39.	SOP pedoman pengelolaan administrasi	Sekretaris	Kasubag Aparatur dan Umum	
40.	SOP pedoman kepegawaian	Sekretaris	Kasubag Aparatur dan Umum	
41.	SOP pedoman pengelolaan keuangan	Sekretaris	Kasubag Keuangan,Program & Perlengkapan	

E	INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT		
42.	Dokumen pendukung dalam penyusunan peraturan/kebijakan/keputusan yang telah ditetapkan dalam waktu 2015-2020 (misalnya naskah akademik, masukan masyarakat kajian, risalah rapat)	Sekretaris	Kasubag Keuangan, Program & Perlengkapan
43.	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai pengadaan barang dan jasa berikut dokumen pendukungnya	Sekretaris	Kasubag Keuangan, Program & Perlengkapan
44.	Rencana strategis badan publik yang masih berlaku	Sekretaris	Kasubag Keuangan, Program & Perlengkapan
45.	Apakah badan publik Sdr menyediakan data statistik yang dibuat dan dikelola badan publik tentang : a. Kepegawain b. Keuangan	Sekretaris Sekretaris	Kasubag Aparatur dan Umum Kasubag Keuangan, Program & Perlengkapan
46.	Informasi data perbendaharaan atau inventaris barang milik negara	Sekretaris	Kasubag Keuangan, Program & Perlengkapan

Sintang, 04 Februari 2020

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang



Dra. SETINA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660405 199303 2 007